

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amboro, Priyo, Yudhi, 2020, *Hukum Kepailitan Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia*, Setara Press, Malang.
- Apeldoorn, van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2019, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ginting, Ras, Elyta, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mamudji, Sri, Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poesoko, Herowati, Suci, Amrih, Dewi, Ivida, 2021, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Ketiga, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rijadi, Prasetyo, Efendi, Jonaedi, 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Satrawidjaja, Man S., 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, Ricardo, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, 2018, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2015, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A.H., 2021, *Cross-Border Insolvency: Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, 2023, *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata, 2024, *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan: Peluang dan Tantangan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1847 – 23 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 05 PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 04K/N/1999 tanggal 9 Maret 1999.

Putusan Pengadilan Niaga No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 13 Januari 1999 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan .

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal dan Artikel

Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, 2023, Kedudukan dan Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Fakultas UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 1 No. 4, hlm. 10-20.

Wijayanta, Tata, 2010, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22 No. 2, hlm. 330-339.

Wijayanta, Tata, 2010, Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22 No. 3, hlm. 216-226.

Wijayanta, Tata, 2014, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 26 No. 1, hlm. 1-10.

Wijayanta, Tata, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14 No. 2, hlm. 216-226.

Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado Leonardus, B.E. Hermawan, 2023, Evaluation Study of the Chancery Court (Balai Harta Peninggalan) as a Bankruptcy Curator, *Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 18 No. 2, hlm. 300-309.

Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, 2024, Development of The Heritage Center as Bankruptcy Curator, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, Vol. 11 No. 1, hlm. 1-10.

Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado Leonardus, B.E. Hermawan, 2024, Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore's Cross-Border Insolvency Asset Settlements?, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13 No. 1, hlm. 27-37.

Wawancara Narasumber

Jamaslin James Purba, 2024, Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pembeli Unit Apartemen Akibat Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Yang Mengatur Mengenai Tidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan dan PKPU Terhadap Pengembang (*Developer*) Apartemen, *Wawancara*, Jakarta, 16 Juli.

Imran Nating, 2024, Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pembeli Unit Apartemen Akibat Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Yang Mengatur Mengenai Tidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan dan PKPU Terhadap Pengembang (*Developer*) Apartemen, *Wawancara*, Jakarta, 12 Juli.

Berita dan Internet

Grahadyarini, BM Lukita, 2024, *Sektor Apartemen Diprediksi Mulai Bergeliat*, [17/01/2024], <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/16/sektor-apartemen-diprediksi-mulai-bergeliat>, [03/04/2024].

Propertiindonesia.id, 2023, *Deretan Apartemen yang Digugat PKPU Dalam Tiga Tahun Terakhir*, [13/04/2023], <https://propertiindonesia.id/post/deretan-apartemen-yang-digugat-pkpu-dalam-tiga-tahun-terakhir>, [03/04/2024].

Sulaiman, Alfin, 2015, *Status Bangunan yang Dibeli dari Developer yang Dinyatakan Pailit*, [18/02/2015], <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-bangunan-yang-dibeli-dari-developer-yang-dinyatakan-pailit-lt54a865444f2f3/>, [29/07/2024].

Wareza, Monica, 2020, *Meikarta Kena PKPU Karena Tak Bayar Uang Jasa Keamanan*, [23/11/2020],

[https://www.cnbcindonesia.com/market/20201123133159-17-203897/meikarta-
kena-pkpu-karena-tak-bayar-uang-jasa-](https://www.cnbcindonesia.com/market/20201123133159-17-203897/meikarta-kena-pkpu-karena-tak-bayar-uang-jasa-), [03/04/2024].

Wicaksono, Lugas, 2023, *Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat*,
[18/07/2023], [https://www.jawapos.com/ekonomi/011784659/pascapandemi-
perkara-kepailitan-dan-pkpu-meningkat](https://www.jawapos.com/ekonomi/011784659/pascapandemi-perkara-kepailitan-dan-pkpu-meningkat), [03/04/2024].